



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies

Makalah Kebijakan No. 44

Mendorong Investasi Konstruktif di Sektor Pertanian dan Pangan di ASEAN

oleh Azizah Nazzala Fauzi & Nisrina Nuraini Nafisah

www.cips-indonesia.org





Kami berterima kasih kepada Center for International Private Enterprise atas dukungannya terhadap publikasi ini

Copy Editor:

Janet Bufton

Ucapan Terima Kasih:

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Aditya Alta dan Felippa Amanta atas bantuannya dalam proses penyusunan penelitian ini.

Sampul:

[freepik.com/aleksandarlittlewolf](https://www.freepik.com/aleksandarlittlewolf)

[freepik.com/](https://www.freepik.com/) www.slon.pics

Makalah Kebijakan No. 44
Mendorong Investasi Konstruktif
di Sektor Pertanian dan Pangan di ASEAN

Penulis:

Azizah Nazzala Fauzi & Nisrina Nuraini Nafisah
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
Desember, 2021

Hak Cipta © 2021 oleh Center for Indonesian Policy Studies

DAFTAR ISI

Glosarium.....	7
Ringkasan Eksekutif.....	9
Sekilas tentang Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN – Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (AIFS-SPA FS) dan Dinamika Investasi Pertanian di ASEAN.....	11
Tinjauan Singkat AIFS-SPA FS.....	12
Kontribusi AIFS-SPA FS terhadap Investasi dalam Sektor Pangan Berbasis Pertanian.....	14
Investasi dalam Sektor Pertanian dan Pangan ASEAN.....	15
Berbagai Peluang dan Tantangan Investasi dalam Ketahanan Pangan di ASEAN.....	18
Kemitraan Pemerintah-Swasta.....	22
Analisis Ketentuan-Ketentuan Investasi AIFS-SPA FS dan Kapasitas Kelembagaan ASEAN dalam Mendorong Investasi yang Transparan dan Akuntabel untuk Ketahanan Pangan.....	23
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	26
Referensi.....	28

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Komponen-Komponen yang Berhubungan dengan Investasi dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN, Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan 2021-2025, dan Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan.....	13
---	-----------

Daftar Gambar

Gambar 1. Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian Sebagai Bagian dari Total Aliran Masuk FDI di Lima Negara Anggota ASEAN (Neraca Pembayaran; dalam %), 2015–2020	16
Gambar 2. Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian ASEAN Berdasarkan Negara Asal (dalam juta USD), 2015–2020.....	19
Gambar 3. Total Aliran Masuk FDI Bersih di Negara-Negara Anggota ASEAN Berdasarkan Negara Penerima (Neraca Pembayaran; dalam Juta Dolar USD), 2015–2020.....	19
Gambar 4. Indeks pembatasan regulasi FDI di sektor pertanian negara-negara anggota ASEAN, 2020.....	20

GLOSARIUM

ADB:

Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank*

AEC:

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community*

AIFS -SPA FS:

Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN – Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan atau *ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Action*

ASEAN:

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Associations of Southeast Asian Nations*

ASEAN RAI:

Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan atau *ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry*

ASEAN-SAS:

Sistem Pertanian Berkelanjutan ASEAN atau *ASEAN Sustainable Agricultural System*

BERNAS:

PadiBeras Nasional Berhad (Perusahaan Beras Nasional Malaysia)

BRIA:

Better Rice Initiative in ASEAN

BULOG:

Badan Urusan Logistik

BUMN:

Badan Usaha Milik Negara

FAO:

Organisasi Pangan dan Pertanian atau *Food and Agriculture Organization*

FDI:

Investasi asing langsung

KPS:

Kemitraan pemerintah-swasta

NFA:

Otoritas Pangan Nasional Filipina

PPP:

Public - Private Partnerships

SSEZ:

Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville

VINAFOOD I:

Perusahaan Pangan Vietnam Utara

VINAFOOD II:

Perusahaan Pangan Vietnam Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketahanan pangan adalah sebuah isu yang mendesak di Asia Tenggara, dengan populasinya yang terus bertumbuh, tingginya tingkat malnutrisi, dan menurunnya produktivitas pertanian. Restriksi-restriksi COVID-19 kian memperburuk situasi, sehingga mengurangi ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat rentan.

Organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN memiliki upaya untuk mencapai ketahanan pangan melalui Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (*ASEAN Integrated Food Security Framework* dan *Strategic Plan of Action*, atau AIFS-SPA FS). Kerangka kerja yang disusun setelah krisis finansial tahun 2009 ini bersifat tidak mengikat (*voluntary*) dan bertujuan untuk mendorong produksi pangan berkelanjutan dengan memperbaiki infrastruktur pertanian dan mengadopsi teknologi-teknologi baru. Kerangka kerja ini juga menyadari pentingnya partisipasi yang seimbang dari seluruh pemangku kepentingan dan mengakui adanya keterbatasan sumber daya sektor publik. Maka dari itu, AIFS-SPA FS mendorong investasi melalui kemitraan pemerintah-swasta (KPS).

Selain mendorong keterlibatan sektor swasta di sektor agrikultur dan pangan, investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI) dapat menguntungkan para petani serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan ASEAN. Secara umum, FDI di sektor pertanian telah meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi pangan, akses terhadap pangan berkualitas, dan mendorong rantai pasok pangan yang efisien dan transparan. Kendati demikian, aliran masuk FDI ke sektor pertanian ASEAN mulai merosot sejak tahun 2015. Rerata aliran masuk FDI ke ASEAN sejak tahun 2016 hingga 2019 adalah 26,89% lebih rendah dari tahun 2015. Pada tahun 2019, sektor pertanian hanya menyumbang kurang dari 10% dari keseluruhan aliran masuk FDI ke ASEAN (ASEAN Statistics, 2021a). Sebagai perbandingan, aliran masuk FDI ke sektor manufaktur dan jasa keuangan dan asuransi mencapai 35% dan 32%, secara berturut-turut (Sekretariat ASEAN, 2020b). Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga-lembaga serupa, ditambah dengan pembatasan-pembatasan teknis terhadap investasi, telah mengurangi daya tarik ASEAN bagi para investor asing. ASEAN mendapatkan skor 0,20 pada indeks pembatasan regulasi FDI (*FDI regulatory restrictiveness index*) yang dibuat oleh OECD—lebih tinggi dari rerata OECD (0,07) maupun rerata non-OECD (0,13), dan hal ini mengindikasikan adanya pembatasan yang relatif lebih banyak (OECD, 2021).

Investasi pertanian dapat menjadi berisiko dan rentan terhadap praktik-praktik seperti perampasan lahan dan korupsi. ASEAN telah mempersiapkan sebuah pedoman bagi para aktor publik dan swasta untuk memastikan investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kriteria investasi yang ada di dalam AIFS-SPA FS merujuk kepada kriteria investasi dalam Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (*ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry* atau ASEAN-RAI). Pedoman ini menggiatkan transparansi dan inklusivitas informasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk petani-petani kecil dan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan menguntungkan bagi pertanian secara berkelanjutan.

ASEAN seyogianya mendorong penyalarsan komitmen terhadap FDI antar negara anggotanya, menggalakkan partisipasi sektor swasta, dan menangani masalah dominasi BUMN dalam sektor pangan berbasis pertanian (*agri-food*) melalui AIFS-SPA FS. Peta jalan (*roadmap*) dan informasi terkait progres implementasi AIFS-SPA FS dan proyek-proyek investasi harus dapat diakses oleh publik atas dasar semangat prinsip transparansi dan akuntabilitas ASEAN-RAI. Melihat kemajuan-kemajuan dalam AIFS-SPA FS, negara-negara anggota ASEAN perlu membentuk sebuah forum pertukaran pengetahuan dan praktik-praktik untuk menangani kesenjangan tata kelola dan kapasitas, serta mendorong iklim yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta.

SEKILAS TENTANG KERANGKA KERJA KETAHANAN PANGAN TERPADU ASEAN – RENCANA AKSI STRATEGIS KETAHANAN PANGAN (AIFS-SPA FS) DAN DINAMIKA INVESTASI PERTANIAN DI ASEAN

Perubahan iklim dan disrupsi logistik global akibat pandemi COVID-19 telah memperburuk tantangan-tantangan ketahanan pangan global. Permasalahan malnutrisi yang berkepanjangan di Kawasan ASEAN menjadi faktor besar yang menyebabkan kawasan tersebut rentan terhadap berbagai tantangan ketahanan pangan dan disrupsi yang dapat terjadi pada pasokan pangan global. Pada anak-anak berusia lima tahun, prevalensi tengkes (*stunting*)¹ di ASEAN tahun 2019 mencapai 24,70%, lebih tinggi dari rerata global (21,30%). Sementara itu, prevalensi *wasting*² mencapai 8,20%, yang juga lebih tinggi dibandingkan rerata global (6,90%) (Global Nutrition Report, t.t.)³. Investasi dalam sektor pertanian di negara-negara anggota ASEAN merosot pada tahun 2020, membuat permasalahan-permasalahan tersebut menjadi kian mendesak.

Rancangan integrasi regional pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 (*ASEAN Economic Community Blueprint 2025*) meliputi sebuah agenda ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan rantai nilai dan partisipasi regional dalam rantai nilai global melalui peningkatan efisiensi produksi pangan, perbaikan infrastruktur dan teknologi, penyesuaian kualitas dan keamanan pangan dengan standar-standar global, dan penggalakan investasi pada pertanian. Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan Masyarakat Ekonomi ASEAN tersedia dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (*ASEAN Integrated Food Security Framework* dan *Strategic Plan of Action on Food Security*, atau AIFS-SPA FS). Keberhasilan implementasinya menjadi hal yang penting untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menerapkan strategi untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat dan tangguh.

AIFS-SPA FS mendorong pertumbuhan investasi untuk melindungi ketahanan pangan kawasan ASEAN dari disrupsi-disrupsi yang ada saat ini dan di masa mendatang. Akan tetapi, masih terdapat hambatan (*bottlenecks*) kebijakan domestik terkait investasi di negara-negara anggota ASEAN, yang menciptakan potensi penghambatan pertumbuhan investasi dan ekonomi regional (Yean, 2020; Zhou & Tan, 2020). Dalam pembahasan terkait hal ini, masih belum ada analisis yang mendalam untuk menentukan apakah AIFS-SPA FS dapat meningkatkan kualitas dan jumlah investasi pada ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota ASEAN menangani kesenjangan kebijakannya.

¹ Tengkes atau *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak akibat malnutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Apabila seorang anak memiliki tinggi badan menurut usianya di bawah minus dua standar deviasi median pertumbuhan anak WHO, ia tergolong *stunted* (WHO, 2015).

² *Wasting* didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana berat badan anak menurut usianya berada di bawah rerata akibat penurunan berat badan yang cepat atau kegagalan dalam menambah berat badan (WHO, t.t.).

³ Data adalah estimasi yang disediakan oleh UNICEF/WHO/World Bank *Joint Malnutrition Estimates Expanded Database*.

Ketentuan-ketentuan investasi yang ada di dalam AIFS-SPA FS masih belum cukup untuk membantu negara-negara anggota ASEAN mengatasi hambatan-hambatan kebijakan dan meningkatkan investasi pertanian yang akuntabel dan transparan. Ketentuan-ketentuan investasi tersebut sebaiknya diperbaiki dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang terstandar, serta mendorong transparansi dan pertukaran pengetahuan untuk memfasilitasi investasi konstruktif guna mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan ASEAN. Diskusi dalam makalah ini akan menjelaskan tentang AIFS-SPA FS dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan investasi regional, dilanjutkan dengan menganalisis kapabilitas ketentuan-ketentuan di dalamnya dalam mendorong investasi konstruktif dengan kesenjangan kebijakan yang ada sesuai dengan tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi ASEAN.

Tinjauan Singkat AIFS-SPA FS

Pertama kali diadopsi pada tahun 2009 atas latar belakang krisis pangan 2007–2008, AIFS-SPA FS terdiri atas berbagai pedoman dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, untuk diterapkan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN demi memastikan ketahanan

“AIFS-SPA FS terdiri atas berbagai pedoman dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, untuk diterapkan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN demi memastikan ketahanan pangan serta perbaikan nutrisi dan kehidupan petani di ASEAN secara jangka panjang.”

pangan serta perbaikan nutrisi dan kehidupan petani di ASEAN secara jangka panjang. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting, dan dokumen-dokumen perencanaan ASEAN diperbarui setiap lima tahun agar sesuai dengan dinamika regional dan global terkini. Kerangka Kerja Ketahanan Terpadu ASEAN 2021-2025 memiliki tujuh tujuan utama, yang sebagian besar sama dengan tujuan-tujuan Kerangka Kerja 2016-2020. Tujuan-tujuan tersebut adalah mendorong pasar yang kondusif bagi perdagangan input dan komoditas pertanian, memastikan kualitas, nutrisi, dan keamanan pangan, serta menjalankan bantuan pangan darurat regional seperti *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves*. Yang baru dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN adalah

prinsip-prinsip pendekatan terhadap ketahanan pangan dengan aksi-aksi untuk menghapus penyebab utama kelaparan dan kemiskinan, termasuk peningkatan akses terhadap pangan bagi semua orang secara progresif. Fokus pada penyebab utama kelaparan, kemiskinan, dan pandemi mendesak adanya revisi tujuan kerangka kerja agar pangan menjadi lebih terjangkau, khususnya saat terjadi krisis.

Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan dibuat untuk menerapkan Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN. Rencana Aksi ini terdiri atas sembilan Langkah Strategis (*Strategic Thrusts*), yang masing-masing memiliki target hasil yang dituju, program-program aksi, dan lembaga-lembaga yang memimpin yang didapuk untuk mendukung implementasinya. Rencana Aksi Strategis ini sebaiknya merujuk kepada dokumen-dokumen ASEAN lainnya yang relevan, seperti Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (*ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry* atau ASEAN RAI), yang mendukung implementasi AIFS-SPA FS.

Hasil-hasil kerja (*deliverables*) dan kegiatan-kegiatan dalam AIFS-SPA FA dan ASEAN RAI disajikan dalam Tabel 1. Langkah Strategis 5: Mendorong Investasi yang Lebih Besar di Sektor Pangan dan Pertanian menjadi fokus utama analisis makalah ini.

Tabel 1.
Contoh Komponen-Komponen yang Berhubungan dengan Investasi dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN, Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan 2021-2025, dan Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan

Dokumen	Komponen/Lembaga yang Memimpin	Keluaran dan Kegiatan	Hasil Kerja (<i>Deliverables</i>)
AIFS-SPA FS	<p>Langkah Strategis 5: Mendorong Investasi yang Lebih Besar di Sektor Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Lembaga yang Memimpin:</i> Negara-negara anggota ASEAN, Forum Bisnis ASEAN, Dewan Perdagangan ASEAN, Kelompok Kerja Sektor di Bidang Tanaman/Koperasi Pertanian/Perikanan/Ternak, Sekretariat ASEAN, ADB, FAO 	<p>Keluaran 5.1 Penambahan investasi yang berkelanjutan dalam industri berbasis pangan dan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 5.1.1 Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan yang berorientasi pada permintaan (<i>demand-oriented</i>) yang menguntungkan usaha-usaha kecil dan menengan dan memfasilitasi koordinasi investasi berdasarkan kemitraan pemerintah-swasta (KPS) dan pemerintah-masyarakat dalam rantai nilai regional berbasis pertanian. Kegiatan 5.1.2 Mendukung pembentukan rantai pasok regional berbasis pertanian dan pangan melalui KPS yang lebih erat. Kegiatan 5.1.3 Mendukung implementasi Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peta jalan untuk membentuk rantai pasok regional berbasis pertanian Persiapan kajian studi pra-kelayakan dan peluang investasi Rantai pasok regional berbasis pertanian dan pangan yang efektif Investasi yang lebih besar dalam rantai pasok regional berbasis pertanian dan pangan Investasi yang lebih besar di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan
ASEAN RAI	Komponen	Poin-Poin Pertimbangan untuk Sektor Publik dan Swasta	
	<p>Pedoman 8: Menghormati Peraturan Hukum dan Struktur, Proses, dan Mekanisme Keluhan Tata Kelola yang Transparan</p>	<p>Informasi yang relevan terkait investasi di seluruh siklus perlu disebar secara proaktif dengan cara yang inklusif, dapat diakses, dan transparan berkenaan dengan keragaman para pemangku kepentingan, termasuk bahasa lokal.</p>	
	<p>Pedoman 9: Menilai dan Mengatasi Dampak dan Mendorong Akuntabilitas</p>	<p>Penilaian dampak yang reguler, independen, dan transparan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan harus tersedia dan dapat diakses secara publik.</p>	

Sumber: Sekretariat ASEAN, 2018 dan Sekretariat ASEAN, 2020a

“Akses terhadap pangan membutuhkan infrastruktur regulasi dan fisik yang tepat, dan ini tidak secara merata ada di seluruh negara anggota ASEAN. Jumlah investasi di sektor agrikultur dan pangan dibutuhkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan infrastruktur tersebut, terutama infrastruktur fisik.

Akses terhadap pangan membutuhkan infrastruktur regulasi dan fisik yang tepat, dan ini tidak secara merata ada di seluruh negara anggota ASEAN. Jumlah investasi di sektor agrikultur dan pangan dibutuhkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan infrastruktur tersebut, terutama infrastruktur fisik. Langkah Strategis 5 memberi rekomendasi untuk menambah investasi pertanian dengan menyusun sebuah peta jalan menuju rantai nilai regional yang berorientasi pada permintaan,⁴ yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pertukaran informasi waktu nyata (*real-time*) antar aktor dalam rantai nilai pasok ASEAN, serta pemanfaatan KPS untuk menutupi sumber daya pemerintah yang terbatas.

Kontribusi AIFS-SPA FS terhadap Investasi dalam Sektor Pangan Berbasis Pertanian

AIFS-SPA FS meraih pencapaian-pencapaian penting dalam menciptakan mekanisme regional dan memperkuat kapasitas organisasi ASEAN dalam implementasinya pada tahun 2009-2013. Pencapaian-pencapaian tersebut meliputi penguatan Dewan Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN (*ASEAN Food Security Reserve Board*), pembuatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN (*ASEAN Food Security Information System*), serta pemberlakuan respons krisis pangan darurat, *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve*.

Pembentukan platform-platform pertukaran informasi pangan regional yang mandiri seperti Dewan Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN dan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN dapat mendukung investasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan konektivitas rantai pasok pangan berbasis pertanian. Namun, reliabilitas dan akurasi data terkait platform-platform ini perlu ditingkatkan (Desker et al., 2013; Setyoko et al., 2015).

Terdapat sedikit bukti yang menunjukkan peningkatan investasi terkini yang didasarkan oleh AIFS-SPA FS. Jumlah inisiatif yang dihasilkan oleh kerangka kerja ini untuk mencapai target dari rencana aksinya tidak tersedia. Kendati demikian, terdapat sejumlah kemajuan dalam program-program yang dipimpin oleh negara-negara anggota ASEAN dan kebijakan-kebijakan terkait investasi dalam ketahanan pangan.

“Jumlah inisiatif yang dihasilkan oleh kerangka kerja ini untuk mencapai target dari rencana aksinya tidak tersedia.”

⁴ “Rantai nilai yang berorientasi pada permintaan (*demand-oriented*)” merupakan manajemen rantai pasok yang merespons sinyal-sinyal dari aktor-aktor dalam jejaring rantai pasok, termasuk para konsumen, petani kecil, dan sektor swasta (KPMG, 2016).

Investasi dalam Sektor Pertanian dan Pangan ASEAN

Secara umum, investasi pada ketahanan pangan dilakukan dalam sektor pertanian dan pangan, yang dapat berbentuk investasi domestik atau asing. Namun, makalah ini akan berfokus pada investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI). Efek-efek *spillover* yang positif dari FDI berpotensi membantu ASEAN memperkuat perekonomian dan ketahanan pangan regionalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi teknologi (Jiang & Chen, 2020), yang keduanya dibutuhkan dalam kejatuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

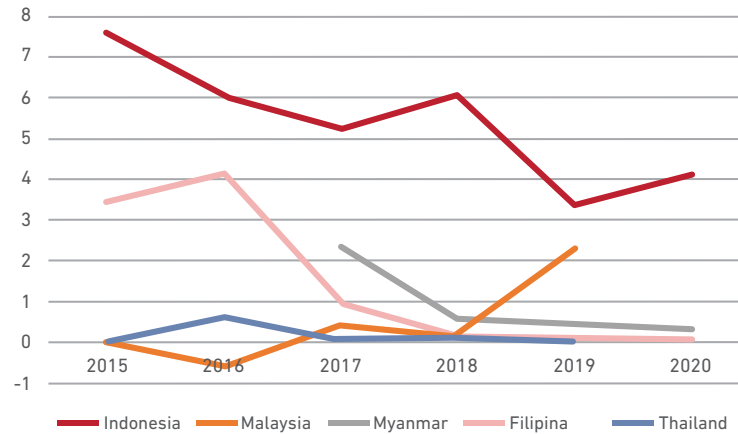
Menurut OECD (2006), investasi swasta meningkatkan kapasitas produktif suatu negara, membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan, dalam hal investasi internasional, menyebarkan kepakaran teknologi dan bisnis secara lokal, menyediakan teknologi dan pengetahuan⁵, serta memicu investasi domestik melalui hubungan pemasok lokal (OECD, 2006; Wardhani & Haryanto, 2020).

Teknologi dari FDI dapat membuat distribusi pangan menjadi lebih efisien dengan meningkatkan keterlacakan pangan dan transparansi dan mengendalikan arus informasi dalam rantai pasok (Deloitte, 2020). Efek-efek *spillover* seperti ini dapat meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan melalui perbaikan kualitas dan kapasitas produksi, serta sistem logistik demi distribusi pangan berkualitas yang lebih efisien, bahkan di kalangan petani (Bank Dunia & UNCTAD, 2014). Mengurangi kesenjangan dalam akses internet di daerah pedesaan dan perkotaan melalui FDI merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan manfaat-manfaat dari efek *spillover* teknologi.

Meski terdapat FDI dalam sektor pertanian di ASEAN, jumlahnya masih kecil. Gambar 1 menunjukkan bahwa, hingga tahun 2020, pertanian hanya mewakili kurang dari 10% total aliran masuk FDI ke kawasan ini. Sebagai perbandingan, proporsi aliran masuk FDI ke sektor manufaktur dan kegiatan keuangan dan asuransi mencapai 35% dan 32% dari keseluruhan FDI, secara berturut-turut (Sekretariat ASEAN, 2020b).

⁵ Penggunaan telepon seluler dan internet oleh petani membantu mereka berkomunikasi secara lebih cepat dan efisien dengan para pedagang, pengecer, dan sesama petani melalui grup WhatsApp (Voutier & Woo, 2021).

Gambar 1.
Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian Sebagai Bagian dari Total Aliran Masuk FDI di Lima Negara Anggota ASEAN (Neraca Pembayaran; dalam %), 2015–2020



Catatan: Data aliran masuk FDI ke sektor pertanian Brunei, Kamboja, Laos, Singapura, dan Vietnam tidak tersedia. Bagian yang minus mengindikasikan bahwa divestasi dan pembayaran utang lebih besar dari investasi yang diterima.

Sumber: Statistical Yearbook Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, & Thailand

Aliran masuk FDI yang rendah dapat mengakibatkan kekurangan pendanaan yang mengancam implementasi AIFS-SPA FS, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bergantung pada investasi melalui FDI. Contohnya, AIFS-SPA FS mendorong inovasi teknologi pertanian dan pembentukan sistem informasi digital yang kokoh di seluruh rantai pasok regional.⁶ FDI swasta menjadi penting dalam penyediaan pendanaan dan kepakaran untuk memperbaiki sistem dan membantu para petani mengadopsi teknologi. Karena terbatasnya sumber daya publik, lebih banyak upaya telah dilakukan melalui KPS yang turut melibatkan para petani kecil, investor skala kecil, dan masyarakat adat dalam proses mendorong investasi di sektor pertanian dan pangan guna mencapai tujuan integrasi ketahanan pangan secara regional di ASEAN.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, FDI sepatutnya bertujuan untuk memberantas penyebab utama kelaparan dan kemiskinan, yang selaras dengan pendekatan yang diadopsi dalam AIFS-SPA FS. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan investasi perlu diatur oleh sebuah kerangka hukum yang transparan dan akuntabel (OECD, 2006), sembari melibatkan sektor swasta dan pemangku-pemangku kepentingan yang paling rentan terhadap kelaparan dan kemiskinan, seperti para petani kecil (Cornell University, IFPRI, & IISD, 2020).

⁶ Kegiatan-kegiatan ini dianjurkan dalam Rencana Aksi Ketahanan Pangan di bawah Kegiatan 3.1.2 terkait pembentukan sistem informasi ketahanan pangan terpadu yang kokoh yang dapat mengumpulkan dan memperbarui data ketahanan pangan secara reguler dan memenuhi pedoman pangan nasional; Kegiatan 4.1.1 terkait diseminasi teknologi dan praktik pertanian baru di berbagai tahap dalam rantai nilai yang dapat diakses oleh seluruh produsen; dan kegiatan-kegiatan dalam Langkah Strategis 9 terkait penyusunan dan penguatan program-program/kebijakan-kebijakan pangan, pertanian, dan ketahanan yang memperbaiki nutrisi dan pengembangan kapasitas untuk implementasi, pemantauan, dan evaluasinya.

Center for International Private Enterprise (CIPE) juga menggarisbawahi kriteria investasi yang lebih disukai dan selaras dengan pedoman ASEAN untuk meningkatkan ketahanan pangan. CIPE mengklasifikasikan investasi ke dalam istilah investasi “konstruktif” dan “korosif”. Investasi konstruktif bersifat transparan dan memiliki tujuan-tujuan yang berorientasi pada pasar, baik pada sumber dana maupun negara tujuan. Investasi ini menghasilkan modal yang menciptakan efek-efek *spillover* pada institusi yang dituju, sehingga memicu praktik-praktik tata kelola yang baik. Sebaliknya, investasi korosif bersifat tidak transparan dan memiliki tujuan-tujuan yang didasarkan pada motif-motif politik yang tidak jelas. Modal yang dihasilkan dari investasi korosif kerap digunakan untuk memengaruhi pembangunan negara tujuan secara negatif, seperti melalui tindak korupsi (Hontz, 2019). ASEAN RAI juga menawarkan sejumlah kriteria penyaringan (*screening*) FDI dalam ketahanan pangan—Pedoman 8 dan Pedoman 9 (disajikan dalam Tabel 1) mendorong investasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kategori investasi konstruktif dan korosif yang dibuat oleh CIPE, bagian berikut ini menganalisis apakah AIFS-SPA FS telah cukup berfokus kepada kesenjangan kebijakan investasi di negara-negara anggota ASEAN yang dapat memengaruhi jumlah dan kualitas aliran FDI di sektor pertanian dan pangan.

BERBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DALAM KETAHANAN PANGAN DI ASEAN

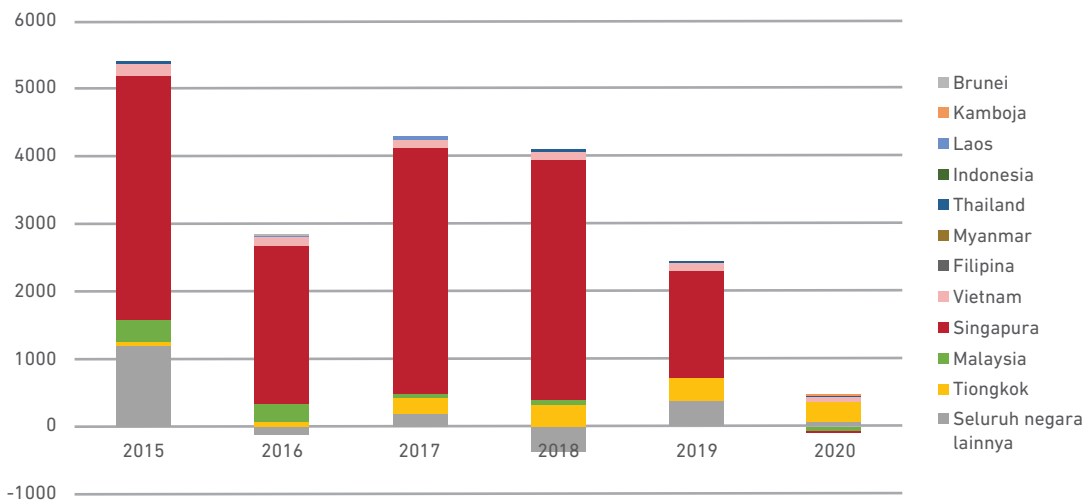
Terdapat berbagai tantangan maupun peluang dalam prospek FDI membantu terwujudnya integrasi regional ASEAN. Sejumlah peluang berasal dari relokasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang keluar dari Tiongkok ke wilayah Asia lainnya sebagai tanggapan terhadap sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dari adanya pertumbuhan tingkat perekonomian dan pendapatan di Tiongkok (Zhou & Tan, 2020). Tantangan-tantangan yang ada belakangan ini sebagian besar diakibatkan oleh efek-efek ekonomi karena pandemi COVID-19.

Kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang dan mengatasi tantangan-tantangan ini akan bergantung pada kapasitas lembaga-lembaga domestik mereka. Kapasitas kelembagaan dapat dilemahkan oleh kesenjangan tata kelola dan kebijakan (UNESCAP, 2020; Kim, Kim & Park, 2020).

FDI dalam sektor pertanian di negara-negara ASEAN mulai menurun sejak tahun 2015 (Gambar 2). Secara rerata, aliran masuk FDI tahunan ke sektor pertanian ASEAN sejak 2016 hingga 2019 adalah 26,89% lebih rendah dari rerata tahun 2015. Apabila tahun 2020 yang dilanda pandemi ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, reratanya telah menurun hingga 41,50% dibandingkan rerata tahun 2015 (ASEAN Statistics, 2021b).

“ FDI dalam sektor pertanian di negara-negara ASEAN mulai menurun sejak tahun 2015 (Gambar 2). Secara rerata, aliran masuk FDI tahunan ke sektor pertanian ASEAN sejak 2016 hingga 2019 adalah 26,89% lebih rendah dari rerata tahun 2015. ”

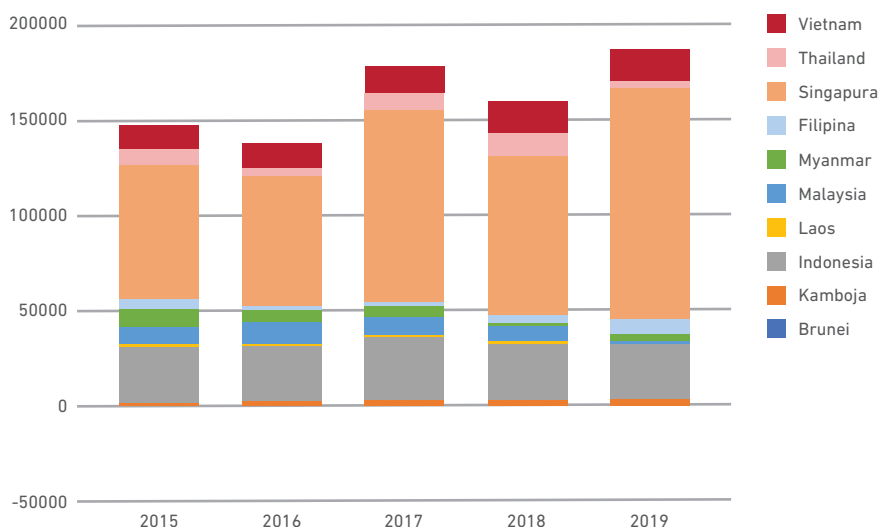
Gambar 2.
Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian ASEAN Berdasarkan Negara Asal (dalam juta USD), 2015–2020



Sumber: ASEAN Statistics, 2021a

Data yang terpilah terkait FDI dalam sektor pertanian di setiap negara anggota ASEAN tidak tersedia. Namun, dalam hal aliran masuk FDI secara total, Singapura menerima proporsi tertinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya (Gambar 3).

Gambar 3.
Total Aliran Masuk FDI Bersih di Negara-Negara Anggota ASEAN Berdasarkan Negara Penerima (Neraca Pembayaran; dalam Juta Dolar USD), 2015–2020



Catatan: nilai tukar per 13 Oktober 2021

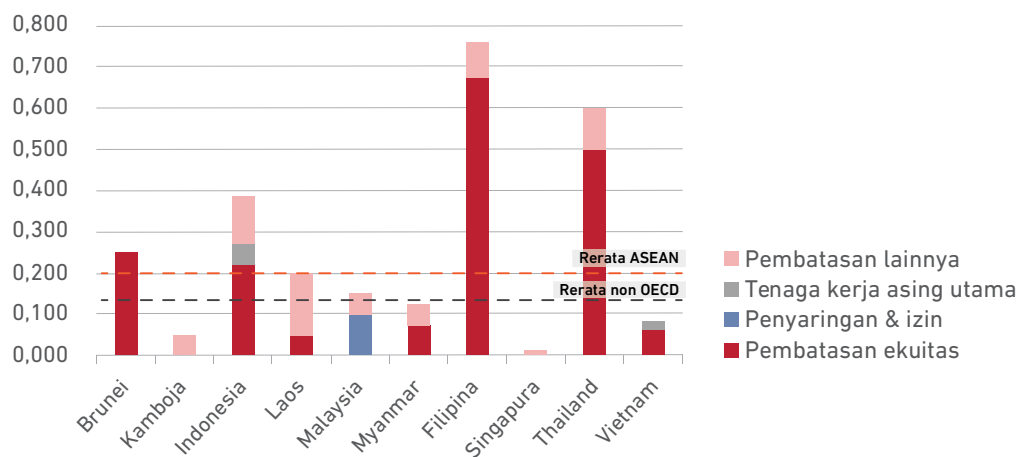
Sumber: Bank Thailand, DICA Myanmar, Departemen Statistik Malaysia, Otoritas Statistik Filipina, Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Dunia

Data terpilah terkait FDI dalam pertanian hanya tersedia untuk Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand. FDI dalam pertanian di lima negara tersebut mewakili hanya 0,10-7,57% dari total aliran masuk FDI (lihat Gambar 1).

Negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menarik investasi karena masih ada kesenjangan kebijakan dan tata kelola. Contohnya, meski Singapura sangat terbuka terhadap FDI, Thailand dan Filipina telah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang menambah pembatasan-pembatasan FDI, dan Myanmar dan Kamboja tidak memiliki sumber daya regulasi yang cukup untuk memastikan akuntabilitas partisipasi sektor swasta. Kesenjangan tata kelola dan kebijakan domestik menghambat kemampuan setiap negara dalam memanfaatkan peluang-peluang FDI untuk pembangunan ekonomi dan integrasi regional.

Skor indeks pembatasan regulasi FDI (*FDI regulatory restrictiveness index*) yang dibuat oleh OECD⁷ untuk setiap negara anggota ASEAN ditunjukkan dalam Gambar 4. Singapura, yang memperoleh skor indeks sebesar 0,01, memimpin dalam hal keterbukaan regulasi. Sementara itu, Filipina (0,76), Thailand (0,60), dan Indonesia (0,38) menerapkan lingkungan regulasi yang lebih restriktif dari rerata ASEAN (0,20) dan rerata non-OECD (0,13) (OECD, 2021).

Gambar 4.
Indeks Pembatasan Regulasi FDI di Sektor Pertanian negara-negara anggota ASEAN, 2020



Catatan: 0= sangat terbuka dan 1= sangat tertutup terhadap FDI
Sumber: OECD, 2021

Pembatasan-pembatasan keterlibatan dan investasi sektor asing menghambat potensi peningkatan produktivitas perekonomian secara luas (OECD, 2019). Pelonggaran regulasi investasi memang dapat mendorong FDI, namun tidak menyentuh seluruh faktor yang mencegah FDI dengan membuatnya menjadi berisiko atau tidak menguntungkan (OECD, 2003). Pembatasan-pembatasan FDI di negara-negara anggota ASEAN sebagian besar adalah pembatasan ekuitas, tetapi pembatasan lainnya yang memengaruhi FDI adalah yang mengatur properti, kepemilikan

⁷ Indeks ini mengukur pembatasan-pembatasan regulasi, seperti pembatasan dalam mekanisme penyaringan dan perizinan, tenaga kerja asing, dan ekuitas asing. Skor 0,00 berarti "sangat tertutup" dan skor 1,00 berarti "sangat terbuka".

lahan, dan izin kerja (Zhan *et al.*, 2015; OECD, 2018; Pasaribu *et al.*, 2021). Kendati regulasi FDI di Kamboja dan Myanmar relatif terbuka, kedua negara ini memiliki sejumlah permasalahan, seperti korupsi dan ketidakstabilan politik, yang mencegah masuknya FDI.

Komitmen terhadap keterbukaan FDI seyogianya dilakukan dengan mengatasi kesenjangan regulasi dan kebijakan serta membuat perubahan-perubahan kebijakan, seperti menghapus pembatasan-pembatasan kepemilikan asing dan melonggarkan kebijakan perdagangan. Menangani masalah monopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memainkan peran besar dalam sektor pertanian di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN juga perlu dilakukan. Dominasi BUMN menciptakan tantangan dalam menarik FDI pertanian, sedangkan kesenjangan tata kelola meningkatkan risiko dan biaya investasi.

Dominasi peran BUMN dan lembaga-lembaga serupa di banyak negara anggota ASEAN di pasar internasional komoditas bahan makanan pokok, seperti beras, menjadi hambatan besar dalam investasi swasta dalam rantai pasok regional untuk komoditas-komoditas dan pangan utama (Patunru & Ilman, 2019; Octania, 2021). Peran BULOG di Indonesia, VINAFOOD I dan II di Vietnam, Otoritas Pangan Nasional (*National Food Authority* atau NFA) di Filipina, dan BERNAS di Malaysia dalam mengimpor dan mendistribusikan komoditas, mengelola subsidi petani, dan menentukan kuota impor menghambat kompetisi sektor swasta dan FDI. Dengan dominasi peran lembaga-lembaga ini di banyak negara anggota ASEAN, hanya ada sedikit diskusi yang membahas masalah-masalah yang mereka timbulkan dalam AIFS-SPA FS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Membuka sektor pertanian ASEAN kepada keterlibatan sektor swasta akan mendorong FDI konstruktif yang dibutuhkan untuk integrasi rantai nilai global, namun hanya jika kerangka kebijakan dan pedoman yang ada dapat mengelola risiko-risiko terkait dengan tepat. Hal ini dikaji lebih lanjut dalam diskusi tentang kemitraan pemerintah-swasta.

Membuka sektor pertanian ASEAN kepada keterlibatan sektor swasta akan mendorong FDI konstruktif yang dibutuhkan untuk integrasi rantai nilai global, namun hanya jika kerangka kebijakan dan pedoman yang ada dapat mengelola risiko-risiko terkait dengan tepat. Hal ini dikaji lebih lanjut dalam diskusi tentang kemitraan pemerintah-swasta.

Salah satu tujuan AIFS-SPA FS adalah untuk mengintegrasikan komoditas-komoditas bahan makanan pokok, seperti beras, dengan rantai pasok regional melalui keterbukaan perdagangan. Pencapaian tujuan ini telah terhambat oleh kebijakan-kebijakan proteksionisme yang juga mencegah investasi. Negara-negara anggota ASEAN terus menerapkan berbagai kebijakan non-perdagangan untuk komoditas-komoditas bahan makanan pokok demi mencapai swasembada dan tujuan-tujuan kebijakan domestik lainnya (Amanta, 2021; Pasaribu, 2021). Sejumlah penelitian beranggapan bahwa integrasi regional dalam perdagangan komoditas pertanian dapat memicu investasi pertanian di negara-negara ASEAN (Kawai & Naknoi, 2015) dan meningkatkan partisipasi mereka dalam rantai nilai global (Verico, 2017).

Pengecualian komoditas-komoditas bahan makanan pokok dari keterbukaan perdagangan menambah peran BUMN dan membatasi manfaat-manfaat yang diharapkan oleh para investor, akses terhadap rantai pasok lokal dan global, dan peluang-peluang pasar dan bisnis. Menggunakan cara ini secara terus-menerus dapat semakin meningkatkan harga komoditas-komoditas bahan makanan pokok dalam negeri (Amanta, 2021) dan biaya integrasi regional untuk menggalakkan investasi. Adalah hal yang krusial bagi AIFS-SPA FS untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan serius.

Kemitraan Pemerintah-Swasta

Rekomendasi-rekomendasi terkait kemitraan pemerintah-swasta (KPS) yang ada di dalam AIFS-SPA FS merujuk kepada Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta ASEAN untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2017 (*2017 ASEAN Public-Private Partnership Regional Framework for Technology Development in the Food, Agriculture, and Forestry Sector*)⁸. KPS bersifat kompleks, sehingga harus diatur dengan baik agar akuntabel dan transparan. KPS yang tidak diatur dengan baik tidak hanya menambah risiko bagi para investor, tetapi juga risiko investasi korosif.

Salah satu contoh KPS adalah *Better Rice Initiative in ASEAN (BRIA)*⁹ di bawah Sistem Pangan Berbasis Pertanian Berkelanjutan ASEAN (*ASEAN Sustainable Agrifood Systems*). Inisiatif ini bertujuan untuk membuat rantai nilai beras menjadi lebih berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan pedesaan untuk memperbaiki ketahanan pangan dan nutrisi di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. BRIA menunjukkan bagaimana sektor swasta dapat memainkan perannya dalam mengembangkan kapasitas teknologi dengan menambah fasilitas dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam kasus BRIA, investasi swasta ini meningkatkan aktivitas-aktivitas pertanian kecil. Akan tetapi, jumlah investasi sektor swasta dalam proyek ini terbatas. Dari total investasi sebesar EUR 31 juta (USD 27,48 juta) untuk ASEAN-SAS, EUR 16 juta (USD 14,18 juta) berasal dari pemerintah federal Jerman, dan sisa EUR 15 jutanya (USD 13,29 juta) berasal dari mitra-mitra swasta dan pemerintah.

Sebaliknya, hasil-hasil negatif dari proyek investasi dalam Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville (*Sihanoukville Special Economic Zone* atau SSEZ) di Kamboja menjadi kisah peringatan tentang FDI yang dilakukan di bawah penegakan hukum yang lemah dan kesenjangan kebijakan. SSEZ melibatkan salah satu proyek FDI terbesar Tiongkok di Kamboja, yang menyasar sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dan industri berbasis pertanian. Meskipun proyek ini menghasilkan lapangan kerja dan modal baru, kesenjangan kebijakan memungkinkan adanya tindak korupsi, khususnya dalam pemberian izin kepada sektor swasta (ADB, 2015). Transfer pengetahuan dan teknologi ke perekonomian lokal juga terbatas. Teknologi yang digunakan dibeli dari luar Kamboja dan bisnis di dalam SSEZ tidak berinvestasi pada penelitian dan pengembangan.

Hubungan politik yang erat antara elit-elit Tiongkok yang mengoperasikan bisnis di SSEZ dengan pemimpin-pemimpin politik Kamboja memberi investasi Tiongkok sebuah perlindungan politik dari pemerintah Kamboja (CIPE, 2020), yang memperburuk permasalahan transparansi dan akuntabilitas serta menciptakan risiko ketidakstabilan sosial. Kasus SSEZ mengilustrasikan tantangan-tantangan yang dapat muncul ketika kesenjangan tata kelola ditambah dengan kurangnya komitmen politik terhadap transparansi dan akuntabilitas dan investasi dengan modal konstruktif.

⁸ Kerangka kerja ini mencakup kerangka kebijakan dan organisasi untuk partisipasi swasta, pemilihan, pengembangan, dan investasi proyek, transparansi keterjangkauan dan anggaran, dan konektivitas infrastruktur transnasional.

⁹ Program ini melibatkan 124.762 petani kecil (17% perempuan), memberi pelatihan kepada 16.993 tenaga kerja pertanian, menghasilkan pendapatan tambahan untuk petani sebesar lebih dari USD 114 juta, dan menjalin 57 kemitraan dengan perusahaan-perusahaan asing seperti Olam, BASF, DSM, dan asosiasi seperti CropLife International. Laporan program dapat diakses di sini: <https://org.doa.go.th/aseancrops/wp-content/uploads/2020/07/ASEAN-SAS-AMAF9Nov17.pdf>.

ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN INVESTASI AIFS-SPA FS DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ASEAN DALAM MENDORONG INVESTASI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK KETAHANAN PANGAN

AIFS-SPA FS berupaya untuk mendorong penambahan investasi yang transparan dan akuntabel di sektor pertanian dan pangan dalam kegiatan-kegiatan di bawah Langkah Strategis 5: Mendorong Investasi yang Lebih Besar di Sektor Pangan dan Pertanian, yang mendukung implementasi pedoman-pedoman ASEAN RAI dan mekanisme tata kelola Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN juga telah menunjukkan progres dalam menciptakan lingkungan regulasi domestik untuk investasi yang didasarkan pada pedoman-pedoman dan kegiatan-kegiatan dalam AIFS-SPA FS, seperti insentif dan dana hibah dari pemerintah Thailand untuk berbagai jenis bisnis, termasuk teknologi pertanian (*agritech*)¹⁰ (Pungcharoenpong, t.t.).

Terlepas dari upaya-upaya ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendominasi sektor pangan dan pertanian di sejumlah negara anggota ASEAN. Selain itu, kesenjangan tata kelola dan kebijakan juga masih menjadi tantangan dalam implementasi AIFS-SPA FS di sejumlah negara, khususnya negara-negara transisi seperti Kamboja. Hal ini memberi ruang bagi investasi korosif di sektor pertanian dan pangan. Kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam kerangka kerja ini semakin melanggengkan risiko investasi korosif dalam ketahanan pangan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendominasi sektor pangan dan pertanian di sejumlah negara anggota ASEAN. Selain itu, kesenjangan tata kelola dan kebijakan juga masih menjadi tantangan dalam implementasi AIFS-SPA FS di sejumlah negara, khususnya negara-negara transisi seperti Kamboja.

Dalam menambah investasi untuk mengembangkan rantai pasok berbasis pangan dan pertanian, AIFS-SPA FS mendorong keterlibatan sektor swasta melalui KPS seperti yang disebut dalam Kegiatan 5.1.1: Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan yang berorientasi pada permintaan (*demand-oriented*), dan 5.1.2: Mendukung pembentukan rantai pasok regional berbasis pertanian dan pangan melalui KPS yang lebih erat. Namun, kegiatan-kegiatan ini tidak secara eksplisit menyebutkan dukungannya terhadap Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta atau *ASEAN PPP Regional Framework for Technology Development in the Food, Agriculture and Forestry Sector* untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, yang mendorong tata kelola yang baik dalam implementasinya. Informasi terkait FDI dan KPS yang dapat diakses oleh publik, termasuk para petani kecil yang menjadi tumpuan pasokan pertanian ASEAN (BCSD, 2016), juga tidak disebutkan.

¹⁰ *Agritech* atau teknologi pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, kualitas pangan, dan mendorong keberlanjutan dalam rantai nilai pangan berbasis pertanian menggunakan teknologi modern (Enterprise Singapore, t.t.).

Meskipun menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendorong investasi konstruktif (OECD, 2015), Kegiatan 5.1.1 dan 5.1.2 perlu disertai dengan tata kelola domestik yang baik untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan KPS bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti benar, khususnya dalam menuntun negara-negara transisi di kawasan ASEAN, yang rentan terhadap eksploitasi aktor-aktor sektor swasta yang dapat berinvestasi menggunakan modal korosif.

Langkah Strategis 5 juga tidak memberi penekanan pada kebutuhan akan sebuah forum pertukaran pengetahuan dan praktik dalam mengatasi kesenjangan kebijakan dalam implementasi KPS. Negara-negara anggota ASEAN dapat berpartisipasi dalam forum seperti ini untuk belajar dari pengalaman keberhasilan satu sama lain terkait keterlibatan sektor swasta yang relevan dalam konteks nasional dan lokal mereka.

Kerangka kerja ini dan dokumen lainnya yang relevan juga tidak memasukkan rekomendasi atau aturan-aturan yang membahas masalah dominasi BUMN. Seperti yang telah didiskusikan di atas, masalah dominasi BUMN dalam sistem pangan harus diatasi untuk mendorong investasi sektor swasta.

AIFS-SPA FS meliputi penyusunan peta jalan untuk membentuk rantai nilai yang berorientasi pada permintaan dalam Kegiatan 5.1.1. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dalam industri berbasis pangan dan pertanian. Peta jalan ini bertujuan untuk mendukung usaha-usaha kecil dan menengah dan memfasilitasi koordinasi investasi antar pemangku kepentingan, seperti melalui KPS. Akan tetapi, baik Kegiatan maupun Langkah Strategis ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kerja sama untuk mengatur dan menambah investasi harus mengikuti Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta ASEAN untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, meskipun kerangka kerja ini termasuk sebagai dokumen rujukan dalam implementasinya. Peta jalan ini telah ditunda hingga tahun 2025, sehingga ASEAN seyogianya mempertimbangkan untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi kesenjangan tata kelola domestik dan menyusun kebijakan yang mendorong investasi konstruktif.

ASEAN masih belum menyepakati kriteria bersama untuk menyaring investasi atau menunjukkan keterbukaan yang sama terhadap FDI dalam ASEAN-RAI. Semakin banyak standar yang diselaraskan atau diakui oleh negara-negara anggota ASEAN, yang didasari oleh kesepakatan yang secara jelas mengidentifikasi peran para pemangku kebijakan yang terlibat, semakin mudah bagi usaha-usaha untuk berinvestasi dan berdagang secara internasional dengan transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat (OECD, 2006). Sebuah standar bersama untuk menyaring dan mengevaluasi FDI di kawasan ASEAN dianjurkan untuk membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kualitas dan jumlah aliran masuk FDI untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pertanian yang sudah ada. Contohnya, sebuah standar bersama diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi data dalam Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN. Ketiadaan standar seperti ini dalam AIFS menciptakan risiko modal korosif, seperti yang terlihat dalam proyek SSEZ di Kamboja.

Masalah keragaman dalam tingkat kelonggaran kebijakan-kebijakan investasi tidak dibahas di dalam kerangka kerja ini, padahal hal tersebut dapat membuat FDI hanya mengalir ke beberapa negara yang memiliki iklim investasi yang lebih kondusif, serta memungkinkan adanya investasi korosif dalam ketahanan pangan. Menurunnya aliran masuk FDI pertanian yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperbaiki sektor pertanian memerlukan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan FDI supaya pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi dan mendorong efek *spillover* teknologi dan transfer pengetahuan. Tanpa adanya kriteria bersama, penyesuaian, dan kesepakatan, komitmen yang lebih kuat dari sejumlah negara anggota ASEAN justru dapat menciptakan persaingan antar negara untuk FDI, alih-alih pendekatan yang terpadu untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan regional melalui pemberantasan penyebab utama kelaparan dan kemiskinan.

Menurunnya aliran masuk FDI pertanian yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperbaiki sektor pertanian memerlukan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan FDI supaya pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi dan mendorong efek *spillover* teknologi dan transfer pengetahuan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam implementasinya, AIFS-SPA FS telah menuntun negara-negara anggota ASEAN dalam memastikan ketahanan pangan di ASEAN, membuat kawasan ini lebih tangguh dalam menghadapi krisis-krisis regional dan global. Meski demikian, negara-negara anggota ASEAN masih mengalami berbagai tantangan dalam hal jumlah maupun kualitas FDI akibat adanya pembatasan-pembatasan perdagangan dan investasi serta kesenjangan kebijakan yang meningkatkan risiko investasi korosif.

Kesenjangan di dalam AIFS-SPA FS menambah kesempatan hilangnya peluang-peluang investasi konstruktif dan meningkatkan risiko investasi korosif, terutama ketika ada persaingan yang tinggi antar negara-negara ini untuk FDI.

AIFS-SPA FS sepatutnya dilengkapi dengan sebuah peta jalan untuk mendorong lebih banyak partisipasi sektor swasta, termasuk penyalarsan standar-standar dalam menyaring FDI dan menindaklanjuti pedoman dari ASEAN RAI untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menyusun kebijakan domestik yang akuntabel dan memfasilitasi investasi konstruktif dalam ketahanan pangan. Kebutuhan akan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan partisipasi sektor swasta khususnya menjadi penting karena akan menciptakan peluang-peluang untuk meningkatkan inklusi digital, teknologi, dan inovasi di sektor pertanian.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, makalah ini mengusulkan sejumlah rekomendasi berikut:

- 1. Memasukkan ketentuan tentang penyalarsan komitmen terhadap keterbukaan FDI dan standar minimum untuk menyaring FDI dalam Kegiatan 5.1.1¹¹ AIFS-SPA FS untuk membuka jalan bagi partisipasi sektor swasta yang lebih besar dan mengatasi masalah dominasi BUMN.** Standar kebijakan bersama untuk memupuk transparansi dan akuntabilitas akan mendorong usaha-usaha dalam menyebarkan investasi di kawasan ASEAN, alih-alih hanya berkonsentrasi pada negara-negara dengan iklim investasi yang lebih baik. Hal ini perlu disertai dengan upaya untuk mengatasi masalah dominasi BUMN dalam sistem pangan regional dengan membagi peran yang jelas kepada sektor swasta, BUMN, dan sektor publik, serta mendorong lebih banyak partisipasi swasta, khususnya dalam meningkatkan teknologi pertanian.

Penyalarsan standar-standar penyaringan FDI bisa jadi akan dihadapkan dengan sejumlah tantangan, karena AIFS-SPA FS bersifat tidak mengikat dan terdapat perbedaan kapasitas negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi kesenjangan kebijakan. Pemahaman bersama tentang tantangan-tantangan domestik yang dihadapi oleh setiap negara sepatutnya ditumbuhkan melalui koordinasi dan kerja sama yang lebih erat,

¹¹ Kegiatan 5.1.1: Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan yang berorientasi pada permintaan.

tidak hanya antar pemimpin ASEAN, tetapi juga dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Hal ini akan mendorong perubahan kebijakan domestik supaya komitmen ASEAN dapat menjadi sejalan dengan kepentingan domestik.

- 2. Membuat evaluasi ketentuan-ketentuan AIFS-SPA FS menjadi transparan dan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan kesadaran akan peta jalan dan memastikan keterlacakan progres.** Kerangka kerja ini diperpanjang setiap lima tahun, sehingga memberi kesempatan yang tepat untuk melakukan evaluasi secara periodik terkait apakah kerangka kerja membantu kawasan Asia Tenggara bergerak menuju ketahanan pangan jangka panjang. Evaluasi implementasi dan keefektifan ketentuan-ketentuan AIFS-SPA FS harus akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh publik, karena publik juga merupakan salah satu pemangku kebijakan dalam ketahanan pangan. Evaluasi yang dapat diakses secara publik akan meningkatkan kesadaran akan informasi dan standar-standar yang ditetapkan dalam peta jalan serta progres dan keberhasilannya. Hal ini akan menghasilkan diskursus publik yang memberi pemahaman tentang apa yang harus diperbaiki dari kerangka kerja ini dan membangun rasa memiliki, kepatuhan, dan urgensi untuk memastikan implementasi AIFS-SPA FS yang efektif.
- 3. Menekankan penggunaan sebuah forum pertukaran pengetahuan dan praktik dalam Langkah Strategis 5 untuk mengatasi kesenjangan tata kelola dan kapasitas guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta.** Untuk mengatasi masalah dominasi sektor publik dan mendorong KPS dalam investasi pertanian di kawasan ini, ASEAN sebaiknya memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik antar negara anggota ASEAN dan para pemangku kepentingan swasta. Pertukaran ini dapat terjadi dalam sebuah forum, seperti yang direkomendasikan oleh Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta ASEAN untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2017. AIFS-SPA FS dapat diperbaiki dengan secara eksplisit menyebutkan forum pertukaran sebagai bagian dari mekanisme implementasi investasi di bawah Langkah Strategis 5 untuk mendorong investasi yang lebih besar di sektor pangan dan pertanian.

REFERENSI

- Amanta, F. (2021). The cost of non-tariff measures on food and agriculture in Indonesia. *Centre for Indonesian Policy Studies*. <https://cutt.ly/CIPS-PolicyPaper36>
- ADB - Asian Development Bank. (2015). Cambodia's special economic zones. ADB Economics Working Paper Series No. 459. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf>
- ASEAN Statistics. (2021a). Flows of inward foreign direct investment (FDI) into ASEAN by source country (in million USD). <https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources>
- ASEAN Statistics. (2021b). Flows of inward foreign direct investment (FDI) to ASEAN by source country and economic sectors (in million USD). <https://data.aseanstats.org/fdi-by-sources-and-sectors>
- ASEAN Sustainable Agrifood Systems (t.t.). ASEAN sustainable agrifood systems. <https://org.doa.go.th/aseancrops/wp-content/uploads/2020/07/ASEAN-SAS-AMAF9Nov17.pdf>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Statistical yearbook of Indonesia 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Bank Dunia. (2021). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current USD). <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>
- Bank Dunia & UNCTAD. (2014). The practice of responsible investment principles in larger-scale agricultural investments: Implications for Corporate Performance and Impact on Local Communities. *World Bank Report No. 86175-GLB*. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wb_unctad_2014_en.pdf
- BCSD - Business Council for Sustainable Development. (2016). Efficient agriculture, stronger economies in ASEAN: private sector's perspectives for policy makers. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/BCSD/BCSD_white_paper.pdf
- CIPE - Center for International Private Enterprise. (2020). Mitigating governance risks from investment in Southeast Asia. <https://www.cipe.org/resources/mitigating-governance-risks-from-investment-in-southeast-asia/>
- Deloitte. (2020). Transforming agriculture through digital technologies. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gr/Documents/consumer-business/gr_Transforming_Agriculture_through_Digital_Technologies_noexp.pdf
- Department of Statistics Singapore. (2020). Yearbook of Statistics Singapore, 2019. https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/reference/yearbook_2019/yos2019.pdf
- Desker, B., Caballero-Anthony, M. & Teng, P. (2013). Thought/issues Paper on ASEAN food security: Towards a more comprehensive framework. ERIA Discussion Paper Series. <http://www.eria.org/ERIA-DP-2013-20.pdf>
- DICA - Department of Investment and Company Administrator Myanmar. (2021). 2020/Yearly approved amount of foreign direct investment by sector. https://www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/yearly_sector_14.pdf
- Enterprise Singapore. (t.t.). Agritech industry profile. <https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/type/agri-tech/industry-profile>
- FAO - Food and Agriculture Organization. (2021). Foreign Direct Investment (FDI). FAO Statistics. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FDI>
- Global Nutrition Report. (t.t.). South-eastern Asia. <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/>
- Hontz, E. (2019). Building a market for everyone: how emerging markets can attract constructive capital and

foster inclusive growth. Center for International Private Enterprise. <https://www.cipe.org/newsroom/building-a-market-for-everyone-how-emerging-markets-can-attract-constructive-capital-and-foster-inclusive-growth/>

Jiang, X. & Chen, Y. (2020). The potential of absorbing foreign agricultural investment to improve food security in developing countries. *Sustainability*, 12(2481). <https://doi.org/10.3390/su12062481>

Kawai, M. & Naknoi, K. (2015). ASEAN economic integration through trade and foreign direct investment: Long-term challenges. Asian Development Bank Institute Working Paper No. 545. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/174835/adbi-wp545.pdf>

Kim, K., Kim, S. & Park, C. (2020). Food Security in Asia and the Pacific amid the COVID-19 Pandemic. ADB Briefs No. 139. <http://dx.doi.org/10.22617/BRF200176->

KPMG. (2016). Demand driven supply chain: A direct link to profitability. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/demand-driven-supply-chain.pdf>

Lee, C., Lee, C. G., & Yeao, M. (2016). Determinants of Singapore's outward FDI. ISEAS Economics Working Paper No. 2016-2. https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/6402/ISEAS_Economics_Working_Paper_2016-02.pdf?sequence=1

Cornell University, IFPRI, & IISD. (2020, 12 October). Ceres2030: Sustainable Solutions to End Hunger. Ceres2030. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/72799>

Nipawan, P. (2015). The ASEAN way of investment protection: an assessment of the ASEAN comprehensive investment agreement. *University of Glasgow, School of Law*. <http://theses.gla.ac.uk/6954/7/2015nipawanphd.pdf>

Octania, G. (2021). The government's role in the Indonesian rice supply chain. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://cutt.ly/CIPS-PolicyPaper32>

OECD. (2003). Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies. <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2506900.pdf>

OECD. (2006). Policy framework for investment. <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/36671400.pdf>

OECD. (2015). Policy framework for investment: 2015 edition. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264208667-en>

OECD. (2018). OECD Investment Policy Reviews: Southeast Asia. <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Southeast-Asia-Investment-Policy-Review-2018.pdf>

OECD. (2021). OECD foreign direct investment regulatory restrictiveness index. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX>

Pasaribu, D., Murwani, A. & Setiawan, I. (2021). Foreign direct investment in Indonesia's agriculture. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://repository.cips-indonesia.org/publications/345257/foreign-direct-investment-in-indonesias-agriculture#cite>

Patunru, A. & Ilman, A. S. (2019). Political economy of rice policy in Indonesia: a perspective on the ASEAN economic opportunity. *Center for Indonesian Policy Studies*. <https://www.cips-indonesia.org/political-economy-rice-policy>

Pungcharoenpong, M.N. (t.t.). Startup ecosystem summary. <https://startupuniversal.com/country/thailand/>

Sekretariat ASEAN. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. <https://kemlu.go.id/download/L1B1Ymxc2hpbmdJbWFnZXZlZHMvRjRjTlW2VudS9BbGxJdGVtcy9BU0VBTiUyMEVDT05PTUIDJTIwQ09NTVVO5VRZJTIwQkxVRVBSSU5UJTIwMjAyNS5wZGY=>

Sekretariat ASEAN. (2018). ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food Agriculture and Forestry. http://exchange.growasia.org/system/files/FINAL%20DRAFT%20ASEAN%20Guidelines%20on%20responsible%20investment%20in%20FAF_0.pdf

Sekretariat ASEAN. (2020a). ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Action on Food Security. https://www.aseankorea.org/eng/Resources/document_view.asp?page=13&BOA_GUBUN=14&BOA_NUM=16571

Sekretariat ASEAN. (2020b). ASEAN Key Figures. https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2020/11/ASEAN_Key_Figures_2020.pdf

Setyoko, N. R., Trewin, R. & Vansetti, D. (2015). Regional rice stocks, prices, trade and food security: Implications for ASEAN. In Trewin, R (Ed.). *Crucial Agricultural Policy: Analysis of Key Threats to Food Security*. World Scientific Publishing: Singapore

UNESCAP. (2020). Foreign direct investment trends and outlook in the Asia and Pacific 2020/2021. <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/APTIT%20FDI.pdf>

Verico, K. (2017). *The Future of ASEAN Economic Integration*. London: Palgrave Macmillan

Voutier, P., & Woo, W.-L. (2021). Digital agriculture in ASEAN: strategies for donor impact. *GrowAsia*. http://exchange.growasia.org/system/files/Digital%20Agriculture%20in%20ASEAN_FINAL.pdf

Wardhani, F. S. & Haryanto, T. (2020). Foreign direct investment in agriculture and food security in developing countries. *Contemporary Economics*, 14(4). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3842843

WHO - World Health Organization. (t.t.). Wasting among children under 5 years of age (JME). <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/302>

WHO - World Health Organization. (2015). Stunting in a nutshell. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>

Yean, T. S. (2020). The hosting of international production in ASEAN, post pandemic. ISEAS Yushof Ishak Institute No. 71. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/06/ISEAS_Perspective_2020_71.pdf

Zhan, J., Mirza, H., & Speller, W. (2015). The impact of larger scale agricultural investments on communities in South East Asia: A first assessment. *International Development Policy*, 6. <https://doi.org/10.4000/poldev.2029>

Zhou, L. Z. & Tan, N. (2020). Post-COVID supply chain reconfigurations: Convergence or divergence in ASEAN economic integration? ASEAN Prosperity Initiative 2020 Briefing Paper No.1. https://www.ideas.org.my/wp-content/uploads/2021/04/API_2020_No_1_V5.pdf

TENTANG PENULIS

Azizah Nazzala Fauzi lulus dengan gelar Master of Arts dalam Ekonomi Politik Internasional dari University of Manchester dan Bachelor of Arts dalam Hubungan Internasional dari University of Nottingham. Azizah memiliki minat penelitian pada isu-isu pembangunan pedesaan dan ekonomi politik migrasi internasional. Ia telah menyelesaikan CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) pada tahun 2021 dan kemudian bergabung dengan tim peneliti bidang pertanian di CIPS.

Nisrina Nuraini Nafisah menjadi bagian dari unit ketahanan pangan dan perdagangan internasional di CIPS setelah lulus dari CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) 2021. Sebelum bergabung dengan CIPS, Nisrina bekerja untuk the ASEAN Foundation, kantor internasional untuk institusi pendidikan tinggi dan sebuah think tank regional. Ia memperoleh gelar Sarjana lewat studi Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Jakarta.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung







TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia